

**ANALISIS *CROWDING OUT EFFECT* DALAM PENENTUAN  
ANGGARAN KESEHATAN KABUPATEN/KOTA  
DI PULAU SUMATERA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*



**OLEH :**  
**FILRANI SARYA**  
**1107737/2011**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2016**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS *CROWDING OUT EFFECT* DALAM PENENTUAN ANGGARAN  
KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA**

**Nama** : Filrani Sarya  
**BP/NIM** : 2011 / 1107737  
**Program Studi** : Ekonomi Pembangunan  
**Konsentrasi** : Ekonomi Publik  
**Fakultas** : Ekonomi

**Padang, Agustus 2016**

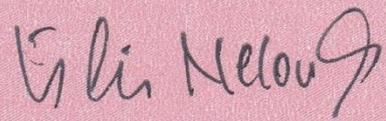
**Disetujui oleh :**

**Pembimbing I**



**Melti Roza Adry, SE, ME**  
NIP. 19830505 200604 2 001

**Pembimbing II**



**Selli Nelonda, SE, M.Sc**  
NIP. 19830506 200604 2 001

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan**



**Drs. H. Alianis, MS**  
NIP. 19591129 198602 1 001

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

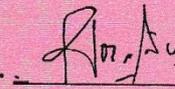
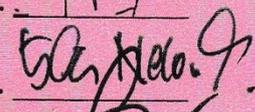
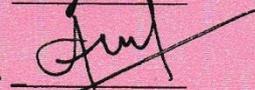
**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ekonomi Pembangunan  
Universitas Negeri Padang**

**ANALISIS *CROWDING OUT EFFECT* DALAM PENENTUAN ANGGARAN  
KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA**

Nama : Filrani Surya  
BP/NIM : 2011 / 1107737  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : Ekonomi Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2016

**Tim Penguji**

No. Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Melti Roza Adry, SE, ME	1. 
2. Sekretaris	: Selli Nelonda, SE, M.Sc	2. 
3. Anggota	: Drs. H. Alianis, MS	3. 
4. Anggota	: Ariusni, SE, M.Si	4. 

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Filrani Sarya  
Nim/BP : 1107737/2011  
Tempat/Tanggal Lahir : Payakumbuh/ 3 Mei 1993  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Keahlian : Ekonomi Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jl. Blang Bintang No 15, Kelurahan Air Tawar Timur,  
Kecamatan Padang Utara, Padang  
No. HP/ Telepon : 085263051105  
Judul Skripsi : Analisis *Crowding Out Effect* dalam Penentuan  
Anggaran Kesehatan Kabupaten/Kota di Pulau  
Sumatera

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya Tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani Asli Tim Pembimbing, Tim Penguji, dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang diperoleh karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku sesuai di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Agustus 2016

Yang menyatakan,



Filrani Sarya

NIM/BP.1107737/2011

## ABSTRAK

**Filrani Sarya, (2011/1107737): Analisis *Crowding Out Effect* Dalam Penentuan Anggaran Kesehatan Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Di Bawah Bimbingan Ibu Melti Roza Adry, SE, ME dan Ibu Selli Nelonda, SE, M.Sc.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh: (1) Rasio anggaran kesehatan dengan non kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Pulau Sumatera. (2) Dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Pulau Sumatera. (3) Ukuran legislatif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Pulau Sumatera. (4) Struktur pasar politik terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Pulau Sumatera. (5) Secara bersama-sama rasio anggaran kesehatan dengan non kesehatan, dana perimbangan, ukuran legislatif, dan struktur pasar politik terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Pulau Sumatera.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan asosiatif. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun 2013 dengan jumlah 106 kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif dan induktif. Analisis induktif dalam penelitian ini mencakup: analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik (uji normalitas residual, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, uji dan multikolinearitas), koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji t dan uji F.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara parsial: (1) *crowding out effect* berpengaruh pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera. (2) Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Pulau Sumatera. (3) Ukuran legislatif berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Pulau Sumatera. (4) Struktur pasar politik tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Pulau Sumatera. (5) Secara bersama-sama rasio anggaran kesehatan dengan non kesehatan, dana perimbangan, ukuran legislatif, dan struktur pasar politik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Pulau Sumatera, dengan besar sumbangan bersama-sama variabel bebas terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 80,65%, dan selebihnya 19,35% pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Kata kunci: *crowding out effect*, rasio anggaran kesehatan dengan non kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi.

## ABSTRACT

**Filrani Sarya, (2011/1107737): The Analysis of Crowding Out Effect In Determining the districts/cities health budget in Sumatera. Skripsi Program Development Economics, Faculty of Economics, Padang State University. Advised by Melti Roza Adry, SE, ME and Selli Nelonda, SE, M.Sc.**

This research aims to analyze the effect of: (1) The ratio of health budget and non-health budget on economic growth of the districts/cities in Sumatera. (2) The fund balance on economic growth of the districts/cities in Sumatera. (3) The size of the legislature on economic growth of the districts/cities in Sumatera. (4) The structure of the political market on economic growth of the districts/cities in Sumatera. (5) The ratio of health budget and non-health budget, fund balance, the size of the legislature, political and market structure on economic growth of the districts/cities in Sumatera.

The types of the research are descriptive and associative. The data in this research is a secondary data in 2013 with the number of 106 districts/cities in Sumatera. The data collection techniques are literature study and documentation. The analysis of the data used are descriptive and inductive. The inductive analysis in this study includes: multiple linear regression analysis, the classic assumption test (residual normality test, autocorrelation test, heteroscedasticity test, test and multicollinearity), the coefficient of determination, and the hypothesis test used was t test and F test.

The results showed that in partially: (1) the crowding out effect gave an effect on the districts/cities in Sumatera. (2) The balancing fund gave a significant effect on the economic growth of the districts/cities in Sumatera. (3) The size of the legislature gave a significant effect on economic growth of the districts/cities in Sumatera. (4) The structure of the political market did not give a significant influence on the economic growth of the districts/cities in Sumatera. (5) The ratio of health budget and non-health budget, equalization fund, the size of the legislature, and the structure of the political market gave a significant effect on the economic growth of the districts/cities in Sumatera. The total contribution of the independent variables on the economic growth was 80,65%, and the rest of 19,35% of economic growth was determined by other variables which was not examined.

**Key words:** crowding out effect, the ratio of health budget and non-health budget, and economic growth.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis *Crowding Out Effect* dalam Penentuan Anggaran Kesehatan Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera”**.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Disamping itu juga untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan untuk menjadikan penulis sebagai orang yang dapat berguna bagi masyarakat.

Dalam Penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan serta kemudahan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada kedua orang tua Penulis, yang selama ini telah memberikan dorongan, semangat serta Doa demi kelancaran penulisan ini. Selain itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibuk Melti Roza Adry, S.E, ME selaku pembimbing I dan Ibuk Selli Nelonda, S.E, M.Sc selaku pembimbing II yang telah menuntun serta membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si serta para Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Drs. Alianis, M.S selaku Ketua Program Studi dan Ibu Novya Zulva Riani, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Kepada Bapak Drs. Alianis, M.S dan Ibu Ariusni, SE, M.Si yang telah bersedia menguji dan memberikan masukan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha yang memberikan kelancaran serta Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang memberikan penulis kemudahan dalam mendapatkan bahan bacaan.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Sumatera Barat yang telah membantu kelancaran bagi penulis dalam mendapatkan data yang dibutuhkan bagi penyelesaian skripsi ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang angkatan 2011 yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan teristimewa penulis persembahkan kepada ibu dan ayah tercinta beserta kakak-kakak, dan sahabat yang sangat penulis sayangi dimana telah banyak memberikan kesungguhan do'a dan bantuan moril serta materil pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis.

Padang, Agustus 2016  
Penulis

Filrani Sarya

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS</b>	
A. Kajian Teori .....	12
1. Keuangan Publik dan Sikap Terhadap Pemerintah .....	12
2. Ukuran Pemerintah .....	12
3. Pengeluaran Pemerintah .....	13
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Crowding Out Effect</i> dalam Penentuan Anggaran Kesehatan .....	14
a. <i>Crowding Out Effect</i> .....	14
b. Pertumbuhan Ekonomi .....	17
c. Kesehatan .....	18
d. Dana Perimbangan .....	20
e. Pilihan Publik .....	21
B. Temuan Penelitian Sejenis .....	23
C. Kerangka Konseptual .....	25
D. Hipotesis Penelitian.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	29
C. Jenis Data dan Sumber Data .....	29
D. Teknik dan Pengumpulan Data .....	30
E. Variabel Penelitian .....	30
F. Defenisi Operasional .....	31

G. Teknik Analisis Data .....	32
1. Analisis Deskriptif .....	32
2. Analisis Induktif .....	32
a. Analisis Regresi Linear Berganda .....	33
b. Uji Asumsi Klasik .....	34
1) Uji Normalitas Residual .....	34
2) Uji Autokorelasi .....	35
3) Uji Heteroskedastisitas .....	35
4) Uji Multikolinearitas .....	36
c. Koefisien Determinasi .....	37
d. Pengujian Hipotesis .....	38
1) Uji t .....	38
2) Uji F .....	39

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	40
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	40
2. Deskripsi Variabel Penelitian .....	40
a. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi .....	41
b. Deskripsi Rasio Anggaran Kesehatan dengan Non Kesehatan .....	43
c. Deskripsi Dana Perimbangan .....	45
d. Deskripsi Ukuran Legislatif .....	46
e. Deskripsi Struktur Pasar Politik .....	48
3. Analisis Induktif .....	49
a. Analisis Regresi Linear Berganda .....	49
b. Uji Asumsi Klasik .....	50
1) Uji Normalitas Residual .....	50
2) Uji Autokorelasi .....	51
3) Uji Heteroskedastisitas .....	53
4) Uji Multikolinearitas .....	54
c. Hasil Regresi Linear Berganda .....	55
d. Koefisien Determinasi .....	57
e. Pengujian Hipotesis .....	58
1) Uji t .....	58
2) Uji F .....	60
B. Pembahasan .....	61
1. Pengaruh Rasio Anggaran Kesehatan dengan Non Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	61
2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	62
3. Pengaruh Ukuran Legislatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	64
4. Pengaruh Struktur Pasar Politik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	65
5. Pengaruh Rasio Anggaran Kesehatan dengan Non Kesehatan, Dana Perimbangan, Ukuran Legislatif, dan Struktur Pasar Politik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	66

<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan.....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Rasio Anggaran Kesehatan dengan Non Kesehatan Provinsi di Pulau Sumatera .....	3
1.2 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi di Pulau Sumatera.....	5
1.3 Laju Pertumbuhan Dana Perimbangan Provinsi di Pulau Sumatera .....	6
1.4 Jumlah Anggota Legislatif dan Herfindhal Index Provinsi di Pulau Sumatera .....	9
4.1 Ringkasan Statistik Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2013.....	41
4.2 Ringkasan Statistik Rasio Anggaran Kesehatan dengan Non Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2013 .....	43
4.3 Ringkasan Statistik Dana Perimbangan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2013.....	45
4.4 Ringkasan Statistik Jumlah Anggota Legislatif Provinsi di Pulau Sumatera Periode 2009-2014.....	47
4.5 Ringkasan Statistik Struktur Pasar Politik kabupaten/kota Sumatera Utara dan Sumatera Barat Periode 2009-2014 .....	48
4.6 Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda .....	50
4.7 Hasil Hasil Uji Normalitas Residual .....	51
4.8 Hasil Hasil Uji Autokorelasi.....	52
4.9 Hasil Hasil Uji Heterokedastisitas .....	53
4.10 Hasil Hasil Uji Multikolinearitas ( <i>VIF</i> ) .....	55

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Kurva <i>crowding out effect</i> .....	15
2.2 Kerangka Konseptual .....	27

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. PDRB, Rasio Anggran Kesehatan dengan Non Kesehatan, Dana Perimbangan, Ukuran Legislatif, dan Struktur Pasar Politik Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2013.....	73
2. Daftar Partai Politik, Jumlah Anggota Masing-masing Partain Politik, Pangsa Partai Pilitik di Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Periode 2009-2014 .....	76
3. Hasil Regresi Linear Berganda .....	115
4. Hasil Normalitas Residual dengan Metode Jarque-Bera .....	115
5. Hasil Estimasi Uji Autokorelasi dengan LM Test .....	116
6. Hasil Uji Heterokoedastisitas .....	117
7. Hasil Estimasi Uji Multikolinearitas.....	118
8. Tabel t .....	121
9. Tabel F .....	124

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesehatan menjadi perhatian utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik karena kesehatan merupakan faktor penentu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mempunyai peran dalam menjamin hak masyarakat untuk sehat dengan memberikan pelayanan secara adil, merata, memadai, berkualitas, dan terjangkau. Investasi pemerintah terhadap sektor kesehatan akan menyebabkan peningkatan kualitas modal manusia. Hal ini akan memacu investasi terhadap pertumbuhan ekonomi karena banyaknya modal yang tersedia untuk pembangunan. Efek pembangunan pada sektor kesehatan tidak dapat dirasakan secara langsung dampaknya dalam jangka pendek, namun dapat dilihat dengan membutuhkan beberapa periode dalam jangka panjang terhadap sektor kesehatan tersebut.

Meningkatnya pengeluaran pemerintah sektor kesehatan disebabkan besarnya perhatian pemerintah, karena kesehatan memiliki peranan besar dalam peningkatan perekonomian di Indonesia khususnya Pulau Sumatera. Peningkatan kualitas kesehatan bertujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup masyarakat di Pulau Sumatera. Semakin tinggi angka harapan hidup maka semakin lama masa produktivitas tenaga kerja dan semakin besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan anggaran merupakan instrumen yang penting dalam penentuan kebijakan fiskal karena dalam penyusunan anggaran yang menjadi pertimbangan utama adalah prioritas. Sebesar apa pun dana yang dimiliki, tetap saja memiliki batasnya. Pemerintah seringkali dihadapkan pada masalah tarik-menarik antara investasi yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur secara fisik dan investasi untuk pembangunan manusia salah satunya melalui sektor kesehatan (Fithria, 2009:69).

Terbatasnya kondisi keuangan yang dimiliki oleh pemerintah, membuat para pembuat keputusan harus extra hati-hati dalam membuat prioritas alokasi sumber dana yang dimiliki. Peningkatan anggaran di salah satu bidang dapat mengurangi porsi anggaran untuk bidang yang lain dan bisa menjadi kontraproduktif dengan program ekonomi pemerintah untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini akan mengakibatkan terjadinya *crowding out effect*. Untuk memenuhi aspek keadilan, seharusnya alokasi terbesar diberikan dalam bentuk pelayanan publik ke masyarakat atau dialokasikan ke sektor yang dapat memberikan efek *multiplier* bagi pertumbuhan ekonomi (Fithria, 2009:70).

Kesehatan merupakan sektor penting karena modal kesehatan yang lebih baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat apakah terjadi *crowding out effect* pada daerah tersebut. Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang terdiri dari 10 provinsi dan 154 kabupaten/kota yang memiliki masalah tersendiri dalam menjelaskan pengaruh *crowding out effect* seperti Tabel 1.1:

**Tabel 1.1 Rasio Anggaran Kesehatan dengan Non Kesehatan Provinsi di Pulau Sumatera**

No	Provinsi	Rasio Anggaran Kesehatan Dengan Non Kesehatan (%)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Aceh	6,44	10,25	12,15	10,39	8,14
2	Sumatera Utara	5,35	5,66	-	3,55	3,48
3	Sumatera Barat	13,15	9,68	12,08	11,14	11,94
4	Riau	6,76	7,05	7,46	7,02	6,83
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
6	Jambi	8,04	10,32	12,64	10,77	10,51
7	Sumatera Selatan	17,27	14,97	8,52	5,94	3,21
8	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
9	Bengkulu	15,27	14,60	19,16	13,94	14,15
10	Lampung	9,15	10,23	-	13,18	9,73

Sumber: *djpk.depkeu.go.id*

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa rasio anggaran kesehatan dengan non kesehatan mengalami fluktuasi setiap tahunnya, seperti Provinsi Bengkulu yang mempunyai rasio anggaran kesehatan dengan non kesehatan tertinggi pada tahun 2011 dengan laju pertumbuhan sebesar 19,16%. Kemudian diikuti Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2009 dengan laju pertumbuhan sebesar 17,27%. Hal ini dapat dilihat dari Provinsi Bengkulu yang mengalami peningkatan rasio anggaran kesehatan dengan non kesehatan lebih besar setiap tahunnya dibanding provinsi lainnya di Pulau Sumatera walaupun sempat mengalami penurunan.

Dalam mewujudkan kesehatan masyarakat diperlukan adanya pengeluaran yang dapat mendorong tingkat kesehatan yang telah ditetapkan dalam APBD. Kepentingan masyarakat menyangkut segala fasilitas serta pelayanan yang diperlukan masyarakat secara umum baik secara fisik maupun non fisik. Untuk mengetahui berpihaknya pemerintah terhadap rakyat dapat dinilai dari seberapa besar anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk kepentingan rakyat.

Kesehatan dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam pendidikan yang merupakan faktor penting atas kehadiran di sekolah, anak-anak yang sehat lebih berprestasi di sekolah dapat belajar secara lebih efisien. Individu yang sehat lebih mampu menggunakan pendidikan secara produktif disetiap waktu dalam kehidupannya. Banyak program kesehatan bergantung pada berbagai keterampilan yang dipelajari di sekolah yang mengajarkan pokok-pokok kesehatan sehingga investasi dalam kesehatan akan meningkatkan harapan hidup.

Menurut Landon (dalam Fithria, 2009:74) *crowding out effect* merupakan kebijakan fiskal yang menyebabkan anggaran kesehatan dengan sektor lainnya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel pengeluaran di sektor-sektor lain-lain. Hal ini dapat dilihat ketika rasio anggaran kesehatan dengan non kesehatan meningkat, namun variabel lain yang mempengaruhinya mengalami penurunan atau sebaliknya. Jika terjadi peningkatan rasio anggaran kesehatan dengan non kesehatan, kemudian variabel yang mempengaruhinya mengalami peningkatan maka tidak terjadi *crowding out effect*.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena dapat mendorong pemerintah untuk mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi pada daerah tersebut. Maka dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi provinsi di Pulau Sumatera seperti Tabel 1.2:

**Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi di Pulau Sumatera**

No	Provinsi	PDRB (%)			
		2010	2011	2012	2013
1	Aceh	3,03	4,84	5,14	4,18
2	Sumatera Utara	6,42	6,63	6,22	6,01
3	Sumatera Barat	5,94	6,26	6,38	6,18
4	Riau	4,21	5,04	3,54	2,61
5	Kepulauan Riau	7,19	6,66	6,82	6,13
6	Jambi	7,35	8,54	7,44	7,88
7	Sumatera Selatan	5,63	6,49	6,01	5,98
8	Kepulauan Bangka Belitung	5,98	6,50	5,72	5,28
9	Bengkulu	6,11	6,46	6,59	6,20
10	Lampung	5,88	6,43	6,53	5,96

Sumber: *PDRB Kabupaten/Kota di Indonesia 2009-2013*

Pada Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa PDRB tertinggi terjadi di Provinsi Jambi pada tahun 2011 dengan laju pertumbuhan sebesar 8,54%. Hal ini dapat dikaitkan dengan *crowding out effect* dengan Tabel 1.1 seperti Provinsi Aceh tahun 2011-2012 yang memiliki rasio anggaran kesehatan dengan non kesehatan yang mengalami penurunan dengan laju pertumbuhan sebesar 12,15% menjadi 10,39%, tetapi laju pertumbuhan PDRB meningkat sebesar 4,84% menjadi 5,14%.

Rasio anggaran kesehatan dengan non kesehatan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat provinsi di Pulau Sumatera. Semakin tinggi rasio anggaran kesehatan dengan non kesehatan masyarakat harusnya pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan. Tetapi ada beberapa provinsi yang mengalami penurunan rasio anggaran kesehatan dengan non kesehatan, namun pertumbuhan ekonominya mengalami peningkatan maupun sebaliknya yang menyebabkan terjadinya *crowding out effect*.

Dana perimbangan menurut peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada kepala daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan

yang berikan oleh pemerintah pusat juga memberikan dampak yang kurang baik terhadap pertumbuhan daerah. Alokasi antar daerah yang masih tidak seimbang sering menimbulkan ketimpangan antar daerah. Misalnya daerah yang membutuhkan dana lebih banyak justru mendapat bagian yang sangat sedikit. Padahal penerimaan daerah yang sangat sedikit bahkan tidak mampu untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakatnya.

Selain itu dana perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah karena, dana perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan daerah dalam APBD disamping pendapatan asli daerah dan pendapatan lain-lain. Sehingga dapat dilihat dana perimbangan provinsi di Pulau Sumatera pada Tabel 1.3:

**Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan Dana Perimbangan Provinsi di Pulau Sumatera**

No	Provinsi	Dana Perimbangan (Juta Rupiah)			
		2010	2011	2012	2013
1	Aceh	2,74	14,31	16,21	13,76
2	Sumatera Utara	7,76	13,04	15,77	13,01
3	Sumatera Barat	1,28	11,11	4,47	39,02
4	Riau	31,27	25,07	12,33	-1,06
5	Kepulauan Riau	25,85	6,40	23,36	4,23
6	Jambi	16,96	12,37	20,49	12,06
7	Sumatera Selatan	19,17	15,21	18,53	14,3
8	Kepulauan Bangka Belitung	-6,06	32,3	10,34	6,36
9	Bengkulu	4,45	12,15	18,22	12,04
10	Lampung	9,56	22,16	18,78	8,64

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota 2009-2013

Berdasarkan Tabel 1.3 menjelaskan bahwa dana perimbangan Provinsi Aceh pada tahun 2010-2011 yang memiliki laju pertumbuhan dana perimbangan sebesar 2,74% menjadi 14,31%, yang diikuti seperti Tabel 1.2 diatas bahwa laju pertumbuhan PDRB meningkat dari 3,03% menjadi 4,84%. Kemudian pada tahun 2011-2012 laju pertumbuhan dana perimbangan

meningkat dari 14,31% menjadi 16,21%, dan diikuti laju pertumbuhan PDRB meningkat dari 4,58% menjadi 5,14%.

Namun disisi lain ada daerah yang telah kaya justru mendapat bagian yang besar. Ketimpangan seperti inilah yang harus diatasi pemerintah pusat dengan cara harus lebih adil dalam memberikan dana perimbangan untuk masing masing daerah. Dana perimbangan yang dimaksud tersebut berguna untuk membantu daerah mendanai kewenangan daerahnya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Pada sisi pemerintah daerah juga harus hati-hati dalam membuat prioritas anggaran. Banyak masyarakat yang menganggap pemerintah daerah lebih mengerti kebutuhan daerahnya sehingga pemerintah pusat tidak lagi ikut dalam menentukan alokasi anggaran yang harus dilakukan. Pemerintah daerah harus untuk lebih bijaksana dalam mengalokasikan anggarannya ke sektor-sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa peningkatan dana perimbangan dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga menambah anggaran membiayaan daerah yang menyebabkan pertumbuhannya meningkat. Mengingat besarnya dukungan pendanaan untuk menjalankan urusan atau kewenangan yang telah diserahkan, seharusnya provinsi di Pulau Sumatera mampu mengalokasikan dana perimbangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Pengeluaran daerah dipergunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, serta modal. Pokok permasalahan anggaran belanja pada APBD tahunan adalah pengeluaran untuk belanja pegawai lebih besar daripada pengeluaran untuk kepentingan publik seperti kesehatan. Padahal semua calon kepala daerah dan anggota legislatif mempunyai program yang hampir serupa yaitu untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik dengan cara kontrol terhadap anggaran kesehatan. Mengingat kepentingan publik sangat penting maka dilakukan penelitian terhadap variabel-variabel yang berpengaruh terutama dari bidang politik.

Dalam pasar politik, individu harus bersikap rasional sebagai pemilih dengan memaksimalkan utilitas serta aspirasi politiknya. Kemudian anggota DPRD, partai politik, pemerintah memaksimalkan perolehan suara dari anggaran publik yang diharapkan *voters*. Pasar politik harus memenuhi syarat-syarat kolektif yang dapat diterima oleh *voters* yang mempunyai permintaan atas barang publik. Perbedaan mendasar dari pelaku ekonomi adalah untuk mencari *profit* (Rachbini, 2006:111).

Pertama-tama pemerintah daerah mengajukan menyusun anggaran pendapatan dan belanja untuk satu tahun yang disusun bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Setelah itu diserahkan kepada DPRD untuk disetujui. DPRD dengan hak budgetnya mempunyai hak untuk menyetujui atau menolak, menetapkan sekaligus melakukan pengawasan pelaksanaan APBD. Tidak ada lembaga selain DPRD yang memiliki budget dan sekaligus untuk mengawasinya (Bahar, 2009:126).

Jumlah anggota legislatif diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena terdapat persaingan antar partai politik dalam penguasaan kursi legislatif pada provinsi di Pulau Sumatera seperti pada Tabel 1.4:

**Tabel 1.4 Jumlah Anggota Legislatif, dan Herfindhal Index Provinsi di Pulau Sumatera**

No	Provinsi	Jumlah Anggota Legislatif	Herfindhal Index
1	Aceh	68	0,27
2	Sumatera Utara	100	0,11
3	Sumatera Barat	53	0,14
4	Riau	55	0,13
5	Kepulauan Riau	45	0,11
6	Jambi	45	0,10
7	Sumatera Selatan	75	0,17
8	Kepulauan Bangka Belitung	45	0,11
9	Bengkulu	45	0,06
10	Lampung	74	0,09

*Sumber: kpu.go.id*

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa jumlah anggota DPRD pada provinsi di Pulau Sumatera yang tertinggi yaitu Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah 100 anggota DPRD, dan terendah yaitu 45 anggota DPRD pada Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Bengkulu. Provinsi yang memiliki jumlah anggota DPRD lebih besar dapat dilihat dari pengaruh politiknya terhadap pertumbuhan ekonominya begitu juga sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB pada Tabel 1.2 Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010-2011 mengalami peningkatan sebesar 6,42% menjadi 6,63%.

Kemudian angka herfindhal indeks dapat digunakan untuk mengukur tingkat persaingan partai politik pada keanggotaan di kursi DPRD. Angka herfindhal tertinggi pada provinsi Aceh sebesar 0,27 indeks, dan terendah terjadi pada Provinsi Bengkulu sebesar 0,06 indeks. Berdasarkan kaitannya

dengan Tabel 1.2 bahwa laju pertumbuhan PDRB Provinsi Aceh pada tahun 2010-2012 mengalami peningkatan sebesar 3,03% menjadi 4,48%, kemudian mengalami peningkatan 5,14%.

Dapat disimpulkan bahwa perlu upaya serius dari berbagai pihak khususnya di daerah-daerah yang dirasakan kurang kondusif dari situasi keamanan konflik sosial, politik, dan sebagainya agar segera memperbaiki kondisi sosial politiknya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis *Crowding Out Effect* dalam Penentuan Anggaran Kesehatan Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terjadi *crowding out effect* pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera?
2. Sejauhmana pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Pulau Sumatera?
3. Sejauhmana pengaruh ukuran legislatif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Pulau Sumatera?
4. Sejauhmana pengaruh struktur pasar politik terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Pulau Sumatera?
5. Sejauhmana pengaruh rasio anggaran kesehatan dengan non kesehatan, dana perimbangan, ukuran legislatif, dan struktur pasar politik secara

bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Pulau Sumatera?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh *crowding out effect* pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera.
2. Pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Pulau Sumatera.
3. Pengaruh ukuran legislatif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Pulau Sumatera.
4. Pengaruh struktur pasar politik terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Pulau Sumatera.
5. Pengaruh rasio anggaran kesehatan dengan non kesehatan, dana perimbangan, ukuran legislatif, dan struktur pasar politik secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Pulau Sumatera.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi pengembangan ilmu ekonomi khususnya ilmu ekonomi publik.
2. Bagi peneliti lebih lanjut yang meneliti tentang pengeluaran sektor publik.
3. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Keuangan Publik dan Sikap Terhadap pemerintah**

Menurut Rosen (1995:4) keuangan publik dan kebijakan peraturan pemerintah memiliki efek penting terhadap alokasi sumber daya. Kebijakan tersebut memiliki tujuan yang dapat dicapai melalui belanja pemerintah. Misalnya jika pemerintah ingin membatasi ukuran perusahaan salah satu kebijakannya adalah menerapkan pajak besar pada perusahaan-perusahaan besar.

Jadi, keuangan publik dikenal sebagai ekonomi sektor publik yang berfokus pada belanja kegiatan pemerintah dan pengaruhnya pada alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan. Ekonom keuangan publik baik menganalisis kebijakan aktual dengan mengembangkan pedoman untuk kegiatan pemerintah. Seorang ekonom dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap peran pemerintah dalam perusahaan seperti kebijakan menerapkan pajak.

##### **2. Ukuran Pemerintah**

Menurut Rosen (1995:13) pendekatan umum untuk mengukur ukuran pemerintah dengan volume pengeluaran tahunan pada dasarnya ada tiga jenis:

- a. Pembelian barang dan jasa oleh pemerintah.
- b. Transfer pendapatan kepada orang yang menjalankan bisnis, atau pemerintahan lainnya. Pemerintah mengambil pendapatan dari beberapa

individu atau organisasi, kemudian memberikan kepada orang yang membutuhkan. Contohnya adalah program kesejahteraan seperti kupon makanan dan subsidi petani dibayar untuk produksi (atau non produksi) dari komoditas tertentu.

- c. Pembayaran bunga seperti pinjaman untuk kegiatan keuangan harus membayar bunga.

Dapat disimpulkan bahwa semua ukuran umum pemerintahan dari ukuran pegawai pemerintah, pengeluaran, pendapatan, dan lain-lain melibatkan beberapa kekurangan. Seperti barang-barang dari kegiatan pembelian barang dan jasa. Meskipun demikian dampak dari ukuran pemerintah pada alokasi sumber daya telah meningkat dari waktu ke waktu.

### **3. Pengeluaran Pemerintah**

Menurut Rosen (1995:17) ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam pengeluaran pemerintah yaitu:

- a. Pertahanan nasional merupakan aspek penting dalam pengeluaran pemerintah.
- b. Program ketahanan sosial telah berkembang dengan cepat. Seperti program sosial memberikan transfer pendapatan kepada orang yang tidak bekerja karena mereka tidak lagi aktif pada pekerjaannya atau pensiun.
- c. Kegiatan kesejahteraan masyarakat yang meningkatkan pengeluaran pemerintah. Kesejahteraan masyarakat seperti program bantuan orang yang telah berusia lanjut, bantuan kepada keluarga terhadap anak-anaknya, dan membayar tagihan medis untuk orang yang kurang mampu.
- d. Pembayaran utang bunga telah meningkat secara relatif. Hal ini karena suku bunga dan utang telah mengalami peningkatan.

Dapat disimpulkan bahwa tingkat pengeluaran pemerintah meningkat baik secara nominal maupun riil, dalam per kapita, dan sebagai persen dari Produk Domestik Bruto. Sementara jaminan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan pembayaran utang menjadi bagian penting dalam

pengeluaran pemerintah. Pembayaran bunga mengakibatkan berkurangnya kontrol tahunan atas tingkat pengeluaran.

#### **4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Crowding Out Effect* dalam Penentuan Anggaran Kesehatan**

##### ***a. Crowding Out Effect***

Menurut Mankiw (2008) *crowding out* karena kebijakan fiskal terjadi ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak yang didanai oleh pinjaman pemerintah. Ketika pemerintah melakukan peminjaman maka terjadi peningkatan tabungan, sehingga tingkat bunga harus mengalami peningkatan. Ketika tingkat suku bunga naik, konsumen menghabiskan lebih sedikit barang yang tahan lama (mobil atau barang-barang lainnya) dan rumah-rumah, perusahaan mengurangi investasi karena peningkatan pembiayaan.

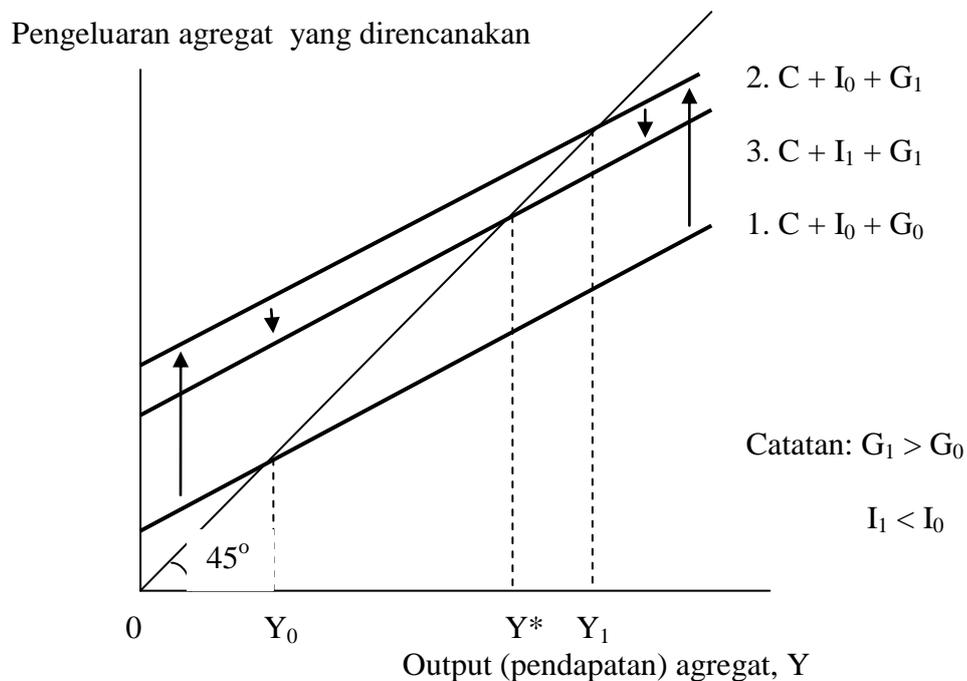
Menurut Mankiw (2008) proses terjadinya *crowding out*:

1. Belanja pemerintah menjadi lebih besar dari penerimaan pajak.
2. Defisit pemerintah menjadi positif.
3. Pemerintah perlu meminjam uang untuk membiayai defisit dalam peningkatan ekonomi yang luas.
4. Dalam ekonomi yang luas tingkat suku bunga harus tinggi.
5. Suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan pengeluaran atau peminjaman uang, sehingga konsumsi dan investasi menurun.

Menurut Case and Fair (2007:177) kecenderungan peningkatan belanja pemerintah yang menyebabkan pengurangan belanja investasi yang direncanakan ini disebut efek penurunan investasi swasta (*crowding out effect*). Tanpa ekspansi apapun dalam penawaran uang untuk mengakomodasikan peningkatan pendapatan dan peningkatan permintaan

uang, *crowding out effect* belanja investasi yang direncanakan sebagian didesak keluar oleh tingkat bunga yang lebih tinggi. Belanja ekstra yang diciptakan oleh naiknya pembelian pemerintah kadang dikompensasi oleh turunnya belanja investasi yang direncanakan. Pendapatan masih naik, tapi efek angka pengganda kenaikan belanja pemerintah dikurangi karena efek negatif tingkat bunga yang lebih tinggi atas investasi yang direncanakan.

Kurva *crowding out effect* dapat digambarkan seperti Gambar 2.1:



Sumber: Case and Fair (2007:177)

Berdasarkan kurva 2.1 dapat dilihat bahwa peningkatan pembelian pemerintah dari  $G_0$  ke  $G_1$  menggeser kurva pengeluaran agregat yang direncanakan ( $C + I_0 + G_0$ ) ke atas. Peningkatan ( $Y$ ) dari  $Y_0$  ke  $Y_1$  menyebabkan permintaan uang naik, yang menghasilkan disequilibrium dalam pasar uang. Permintaan uang berlebih meningkatkan tingkat

bunga, yang menyebabkan  $I$  turun dari  $I_0$  ke  $I_1$ . Turunnya  $I$  menarik kurva pengeluaran agregat yang direncanakan kembali turun, yang menurunkan tingkat ekuilibrium pendapatan dari  $Y^*$ .

*Crowding-out* dan ukuran akhir angka pengganda belanja pemerintah bergantung pada beberapa hal. Pertama, kita mengasumsikan Fed tidak mengubah kuantitas uang yang ditawarkan. Jika kita hendak mengasumsikan sebaliknya bahwa Fed menambah kuantitas uang yang ditawarkan yang lebih tinggi dan tingkat bunga tidak akan naik. Tanpa tingkat bunga yang lebih tinggi, tidak akan ada *crowding-out*. Kedua, efek *crowding-out* bergantung pada sensitivitas atau insensitivitas belanja investasi yang direncanakan terhadap perubahan tingkat bunga. *Crowding out* terjadi ketika tingkat bunga yang lebih tinggi mengurangi belanja investasi. Akan tetapi, investasi bergantung pada faktor-faktor selain tingkat bunga, dan investasi mungkin kadang sangat insensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Jika investasi yang direncanakan tidak turun ketika tingkat bunga naik, tidak akan ada efek *crowding-out* (Case and Fair, 2007:178)

Dapat disimpulkan bahwa *crowding out effect* terjadi ketika kebijakan fiskal pemerintah meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak yang didanai oleh pinjaman pemerintah. Ketika pemerintah melakukan peminjaman maka terjadi peningkatan tabungan, sehingga tingkat bunga harus mengalami peningkatan. Ketika tingkat suku bunga naik, konsumen menghabiskan lebih sedikit barang yang tahan lama.

Investasi bergantung pada faktor-faktor selain tingkat bunga, dan investasi mungkin kadang sangat insensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Jika investasi yang direncanakan tidak turun ketika tingkat bunga naik, tidak akan ada efek *crowding-out*.

#### **b. Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Case and Fair (2007:311) pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan output total dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika perekonomian mengalami peningkatan output total. Melalui pertumbuhan ekonomi maka standar kehidupan membaik, tetapi pertumbuhan ekonomi membawa perubahan seperti hal-hal baru diproduksi sedangkan yang lain ketinggalan zaman. Beberapa percaya pertumbuhan adalah tujuan fundamental suatu masyarakat, karena bisa mengangkat orang dari kemiskinan dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka.

Menurut Case and Fair (2007:313) pertumbuhan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai peningkatan GDP riil perkapita. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan standar kehidupan, maka tingkat pertumbuhan harus melebihi dari tingkat kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan ekonomi terjadi ketika:

1. Masyarakat mendapatkan lebih banyak sumber daya
2. Masyarakat dapat menemukan cara baru menggunakan sumber daya yang tersedia dengan efisien.

Menurut Jhingan (2003:67) secara umum faktor penentu pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi faktor ekonomi dan non

ekonomi. Faktor penentu ekonomi terdiri dari sumber alam, akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi, serta pembagian kerja dan skala produksi. Sedangkan faktor penentu non ekonomi yaitu faktor sosial, faktor manusia, faktor politik, dan administrasi.

Teori pertumbuhan dapat dibedakan menjadi dua pemikiran, yakni teori neoklasik dan modern. Dalam teori neoklasik pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh pertumbuhan produksi sangat ditentukan oleh faktor produksi berupa kuantitas tenaga kerja dan modal. Peran teknologi dan ilmu pengetahuan serta peningkatan kualitas tenaga kerja dan input produksi lainnya tidak mendapat perhatian secara eksplisit atau dianggap konstan (Tambunan, 2003:45).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan output total dalam perekonomian yang dapat diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) atas harga konstan 2000. Peningkatan kesejahteraan kesejahteraan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Faktor penentu pertumbuhan ekonomi dapat berupa faktor ekonomi dan non ekonomi.

### **c. Kesehatan**

Menurut Todaro (2003:405) menyatakan bahwa kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas yang menjadi komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input fungsi produksi agregat dalam peran penting pembangunan ekonomi.

Menurut WHO (*World Health Organizing*) dalam Todaro (2003:21) kesehatan banyak menyangkut keadaan yang pada umumnya menunjukkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Status kesehatan seseorang dikatakan baik kalau sekiranya setiap organ tubuh berfungsi secara layak dan cairan serta gas dalam tubuhnya mempunyai kandungan yang tepat dalam perkembangan otot, dan status gizi yang dimakan.

Selain mempunyai efek positif terhadap kesehatan nasional, kesehatan dasar juga merupakan cara yang efektif untuk mencapai pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Karena meskipun kedua orang tua mereka pekerja atau berwirausaha dan tidak terampil untuk cukup produktif namun jika mereka lemah, tidak sehat, dan tidak terampil untuk cukup produktif dalam menyokong kehidupan keluarganya maka anak-anak disuruh bekerja. Dimana kalkulasi manfaat investasi kesehatan harus selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang untuk melihat keadaan pembangunan ekonomi (Todaro, 2003:453).

Menurut Schultz (dalam Jhingan, 2003:414) menyatakan bahwa pelayanan fasilitas kesehatan, pada umumnya diartikan mencakup semua pengeluaran yang mempengaruhi angka harapan hidup, kekuatan dan stamina, tenaga serta vitalitas rakyat.

Jadi, dalam proses pembangunan sumber daya manusia dalam aspek kesehatan memegang peran penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Pembangunan di bidang kesehatan harusnya mendapat

perhatian khusus oleh pemerintah agar menjamin manusia yang sehat jasmani dan rohani. Biasanya Dinas Kesehatan diarahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok, seperti pembangunan puskesmas, pemberantasan gizi buruk, mengurangi angka kematian sewaktu melahirkan, membantu subsidi bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pengobatan gratis dan lain-lain.

#### **d. Dana Perimbangan**

Menurut Widjaja (2004:129) dana perimbangan merupakan pendapatan yang berasal dari APBN yang mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik.

Dana perimbangan menurut Adi (2009:2) merupakan alokatif anggaran pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah. Dana perimbangan diperuntukkan untuk menjamin terciptanya perimbangan secara vertikal di bidang keuangan antar tingkat pemerintahan, menjamin terciptanya perimbangan horizontal di bidang keuangan antar pemerintah di tingkat yang sama, dan menjamin terselenggaranya kegiatan-kegiatan tertentu di daerah yang sejalan dengan kepentingan nasional.

Menurut Widjaja (2004:132) Dana perimbangan terdiri atas Dana Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar

daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Kemudian Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

**e. Pilihan Publik**

Pilihan publik bukan hanya sekedar metode dalam arti yang sempit dan juga bukan seperangkat alat analisis biasa yang dipakai untuk menjelaskan kejadian atau fenomena sederhana. Teori pilihan publik berguna untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena non pasar (Rachbini, 2006:67).

Menurut Todaro (2006:42) sistem pada ekonomi politik yang menguntungkan pertumbuhan ekonomi terbagi dua yaitu demokratis dan otokrasi. Dengan sistem demokrasi, para politisi yang ingin dipilih kembali memperoleh insentif untuk meyalurkan keinginan dan kepentingan mayoritas masyarakat luas. Namun disisi lain, pemilihan yang akan berlangsung tak lama lagi akan memberikan dorongan untuk mengejar pencapaian jangka pendek yang dapat digembar-gemborkan selama kampanye, dan bukan mengejar apa yang bagus untuk

pengembangan jangka panjang. Dengan sistem autokrasi terdapat hambatan yang lebih sedikit mengenai apa saja yang dapat dikorupsi dan selama beberapa lama. Namun para politisi yang cukup yakin akan berkuasa cukup lama dapat mengejar strategi pembangunan jangka panjang.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (dalam Deliarnov, 2006:139) teori pilihan publik adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Teori pilihan publik dapat digunakan untuk mempelajari perilaku para aktor politik maupun sebagai petunjuk untuk mengambil keputusan dalam penentuan pilihan kebijakan publik yang paling efektif. Subjek dalam pilihan publik adalah pemilih, partai politik, politisi, birokrat, dan kelompok kepentingan.

Dalam model publik, hasil politik ditentukan oleh permintaan dan penawaran seperti terbentuknya harga dalam pasar persaingan sempurna. Pada model pasar persaingan sempurna harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar yang membuat konsumen dan produsen tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk bisa mempengaruhi harga-harga di pasar. Secara perorangan konsumen dan produsen bisa menaikkan dan menurunkan permintaan dan penawaran mereka, tetapi karena jumlah pembeli dan penjual di pasar sangat banyak maka tindakan perorangan tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi

harga di pasar. Pada akhirnya keduanya bertindak sebagai *price takers*, menerima tingkat harga yang terbentuk di pasar (Deliarnov, 2006:140).

Paradigma pasar yang substansi utamanya adalah intitusi pertukaran, menjelaskan sikap dan tindakan individu di luar kajian ekonomi, Pasar dalam ekonomi diatur oleh hukum dasar, yaitu tatanan yang spontan. Sedangkan pasar dalam politik dipakai sebagai konsep untuk menjelaskan pertukaran antara partai politik dengan pemilih dan antara pemerintah yang berkuasa dengan rakyat (Rachbini, 2006:73).

## **B. Temuan Penelitian Sejenis**

Hasil penelitian sejenis merupakan bagian yang menguraikan tentang beberapa pendapat atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dimana nantinya dapat digunakan sebagai referensi untuk melihat apakah penelitian yang dilakukan mendukung atau tidak dengan penelitian sebelumnya.

Furceri dan Sousa (2009) dalam penelitiannya yang berjudul *The Impact of Government Spending on the Private Sector: Crowding-out versus Crowding-in Effects* pada 145 negara dari tahun 1960-2007, yang menggunakan metode analisis *Ordinary Least Square*, *Fixed Effects*, dan *Random Effects*. Variabel bebas yang digunakan adalah rasio belanja pemerintah, investasi swasta, dan konsumsi swasta. Sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki *crowding out* dengan mempengaruhi secara negatif baik konsumsi swasta dan investasi.

Oltular (2011) dalam penelitiannya yang berjudul *Crowding Out Effect of Government Spending on Private Investments in Turkey: A Cointegration Analysis* dengan menggunakan metode VAR. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah PDB, tingkat suku bunga, pengeluaran investasi pemerintah, pembayaran bunga pemerintah, dan total pengeluaran pemerintah. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah investasi swasta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa total belanja pemerintah dan pengalihan pembayaran memiliki efek positif pada investasi swasta sesuai dengan hipotesis *crowding-in*, sementara pengeluaran investasi pemerintah mengalami *crowding-out* terhadap investasi swasta di Turki. Hasil lain menunjukkan bahwa PDB dan tingkat suku bunga memiliki efek positif dan negatif pada investasi swasta.

Fithria (2009) dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Crowding Out Effect dan Public Choice dalam Penentuan Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah Studi Kasus 337 Kabupaten/Kota Periode 2001-2005 di Indonesia*, yang menggunakan metode analisis *Pooled Least Square, Fixed Effects (Least Square Dummy Variables)*, dan *Random Effects*. Variabel bebas yang digunakan adalah dana perimbangan, anggaran pendidikan dengan non pendidikan, dan anggota DPRD. Sedangkan variabel terikatnya adalah pengeluaran pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel rasio anggaran pendidikan dengan non pendidikan secara signifikan dan memiliki nilai koefisien negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang membuktikan bahwa *crowding out* memang

terjadi. Kemudian dana perimbangan dan anggota DPRD partai besar memiliki pengaruh besar terhadap rasio anggaran pendidikan dengan non pendidikan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis melihat kontribusi dari analisis *crowding out effect* dalam penentuan anggaran kesehatan dengan non kesehatan kab/kota di Pulau Sumatera. Variabel bebas yang digunakan adalah rasio anggaran kesehatan dengan non kesehatan, kemudian variabel kontrolnya adalah dana perimbangan, ukuran legislatif, dan struktur pasar politik. Sehingga mendeskripsikan sejauhmana pengaruh rasio anggaran kesehatan dengan non kesehatan, dana perimbangan, ukuran legislatif, dan struktur pasar politik terhadap pertumbuhan ekonomi kab/kota di Pulau Sumatera.

### **C. Kerangka Konseptual**

Penelitian ini mencoba untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *crowding out effect* dalam penentuan anggaran kesehatan kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Variabel yang akan dibahas adalah rasio anggaran kesehatan dengan non kesehatan sebagai variabel bebas, kemudian dana perimbangan, ukuran legislatif, dan struktur pasar politik sebagai variabel kontrol, dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat.

Rasio anggaran kesehatan dengan non kesehatan merupakan langkah awal untuk melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Terjadinya penurunan anggaran kesehatan dengan non kesehatan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat atau sebaliknya sehingga berpengaruh signifikan dan negatif maka akan menyebabkan terjadinya *crowding out effect*.

Rasio anggaran kesehatan dengan non kesehatan melambangkan tingkat pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Sehingga banyak pelayanan kesehatan yang dijalankan pemerintah seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

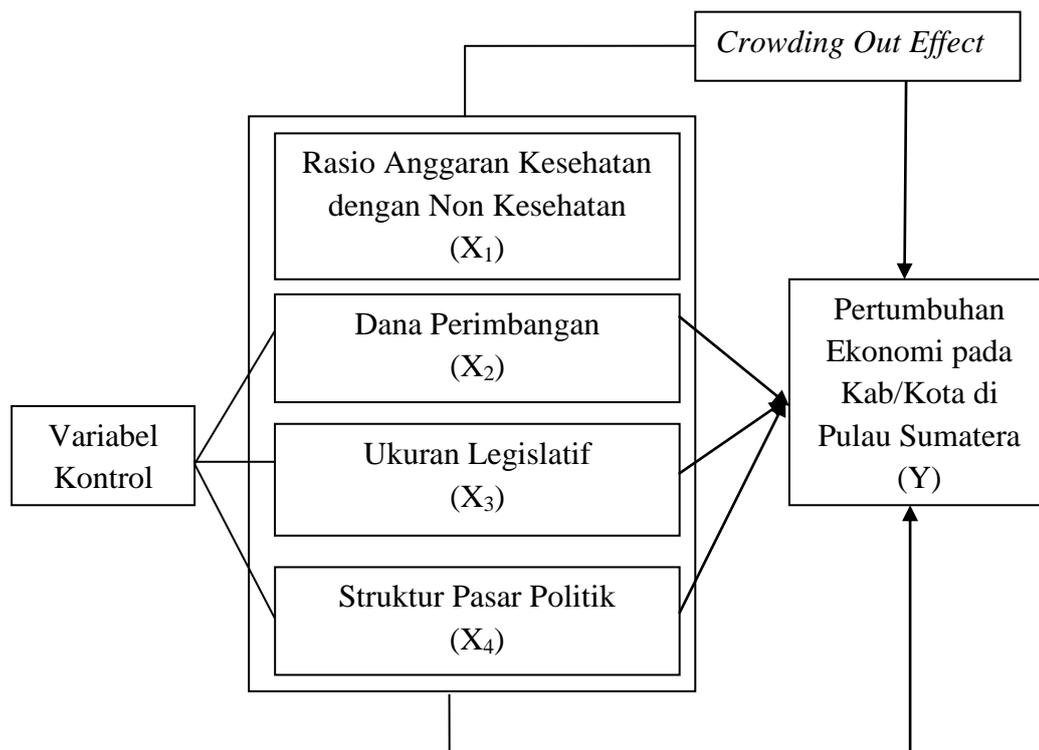
Dana perimbangan yang dimiliki dapat dilihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya dana yang diterima daerah maka akan berpengaruh dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah, pengembangan ekonomi lokal.

Ukuran legislatif merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, serta anggota legislatif juga mempunyai hak budget untuk mengontrol anggaran pengeluaran bagi pemerintah. Peningkatan jumlah anggota legislatif dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Jumlah anggota legislatif yang dapat disamakan dengan produsen pada pasar ekonomi juga sama prinsipnya pada pasar politik. Jika banyak jumlah produsen pada suatu pasar yang barangnya homogen, tentu tidak ada persaingan harga di antara produsen tersebut. Semakin besar jumlah anggota legislatif dapat dilihat bagaimana pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Struktur pasar politik merupakan faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena terkait dengan tingkat persaingan di kursi legislatif. Semakin besar persaingan kursi legislatif oleh beberapa partai

akan cenderung mengakibatkan kebijakan terkonsentrasi di tangan mereka. Semakin besar persaingan partai politik tersebut di DPRD, maka semakin besar pula persaingan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Secara sistematis, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.2:



Gambar 2.2. Kerangka Konseptual Analisis *Crowding Out Effect* dalam Penentuan Anggaran Kesehatan Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera

#### D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka konseptual di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga *crowding out effect* berpengaruh positif dan tidak signifikan pada kab/kota di Pulau Sumatera.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Diduga dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kab/kota di Pulau Sumatera.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Diduga ukuran legislatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kab/kota di Pulau Sumatera.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

4. Diduga struktur pasar politik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kab/kota di Pulau Sumatera.

$$H_0 : \beta_4 = 0$$

$$H_a : \beta_4 \neq 0$$

5. Diduga rasio anggaran kesehatan dengan non kesehatan, dana perimbangan, ukuran legislatif, dan struktur pasar politik secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kab/kota di Pulau Sumatera.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

$$H_a \text{ salah satu } \beta \neq 0$$

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian data dan pembahasan terhadap hasil penelitian antara variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio anggaran kesehatan dengan non kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kab/kota di Pulau Sumatera. Hasil penelitian ini menyebabkan tidak terjadinya *crowding out effect* karena meningkatnya rasio anggaran kesehatan dengan non kesehatan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Ini artinya pemerintah dapat dikatakan konsisten dalam melakukan kebijakan fiskalnya yaitu ketika rasio anggaran kesehatan dengan non kesehatan ditingkatkan ternyata diikuti oleh peningkatan pengeluaran di sektor-sektor yang lain sehingga tidak menyebabkan terjadinya *crowding out effect*. Tidak signifikannya rasio anggaran kesehatan dengan non kesehatan kemungkinan disebabkan karena data pada penelitian berfluktuasi, dan tidak mengalami perubahan yang cukup berarti.
2. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kab/kota di Pulau Sumatera. Semakin tinggi dana perimbangan maka pertumbuhan ekonomi kab/kota di Pulau Sumatera akan semakin meningkat.

3. Ukuran legislatif berpengaruh positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi ukuran legislatif maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kab/kota di Pulau Sumatera.
4. Struktur pasar politik berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Semakin meningkat struktur pasar politik maka pertumbuhan ekonomi kab/kota di Pulau Sumatera juga mengalami penurunan. Tidak signifikan ini kemungkinan disebabkan karena data pada penelitian berfluktuasi, dan tidak mengalami perubahan yang cukup berarti.
5. Secara bersama-sama rasio anggaran kesehatan dengan non kesehatan, dana perimbangan, ukuran legislatif, dan struktur pasar politik berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kab/kota di Pulau Sumatera. (Prob = 0.0000) dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.8065. Sehingga keempat faktor tersebut memiliki sumbangan terhadap kabupaten/kota di Pulau Sumatera sebesar 80,65%. Semakin tinggi rasio anggaran kesehatan dengan non kesehatan, dana perimbangan, ukuran legislatif, dan struktur pasar politik maka secara bersama-sama akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Berarti sisanya sebesar 19,35% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

## **B. Saran**

Dari simpulan tersebut dapat penulis kemukakan beberapa saran-saran yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Pengaruh rasio anggaran kesehatan dengan non kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan tidak menyebabkan terjadinya *crowding out effect* kab/kota di Pulau Sumatera, maka penulis menyarankan agar pemerintah tetap mengoptimalkan anggaran sektor kesehatan dengan non kesehatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kab/kota di Pulau Sumatera.
2. Dengan adanya pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kab/kota di Pulau Sumatera, hendaknya pemerintah dapat memberikan dana kepada daerah-daerah yang membutuhkan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kab/kota di Pulau Sumatera.
3. Dengan adanya pengaruh ukuran legislatif terhadap pertumbuhan ekonomi kab/kota di Pulau Sumatera, maka diharapkan pemerintah menambah jumlah anggota legislatifnya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kab/kota di Pulau Sumatera.
4. Dengan terbuktinya pengaruh struktur pasar politik terhadap pertumbuhan ekonomi kab/kota di Pulau Sumatera, maka peneliti menyarankan jumlah tertentu pada partai politik untuk merekomendasikan calon legislatif selama lima tahun ke depan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kab/kota di Pulau Sumatera.
5. Bagi peneliti selanjutnya penulis merekomendasikan menggunakan variabel *crowding out effect* lainnya seperti sektor-sektor pengeluaran pemerintah lainnya dan variabel politik dengan menambah daerah penelitiannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinusa, Ilham, Catur Sugiyanto dan Budiono Sri Handoko 2013. Vol. 13 No. 2. *Pengaruh Konsentrasi Partai Politik terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Daerah dengan Studi Kasus di 55 Kabupaten/Kota pada periode 2004 dan 2009*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ariefianto, M. Doddy. 2012. *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga.
- Astuti, Sri Edi. 2010. *Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Era Desentralisasi Fiskal di Jawa Timur*. Jawa Timur: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2009-2013*. Jakarta: BPS Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2009-2013*. Jakarta: BPS Republik Indonesia.
- Bahar, Ujang. 2009. *Otonomi Daerah terhadap Pinjaman Luar Negeri antara Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Indeks.
- Bati. 2009. *Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera)*. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Case and Fair. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Edisi Kedelapan Jilid Dua*. Jakarta: Erlangga.
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2013. *APBD Klasifikasi Urusan* Diunduh dari <http://www.djpk.depkeu.go.id> pada tanggal 10 Maret 2015.
- Fithria, Irfani. 2009. Vol. X No. 1. *Analisis Crowding Out Effect dan Public Choice dalam Penentuan Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah Studi Kasus 337 Kab/Kota Periode 2001-2005 di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Gujarati. 2003. *Statistik Ekonometrika*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gujarati, Damodar N. 2006. *Dasar-dasar Ekonometrika Edisi Ketiga Jilid Dua*. Jakarta: Erlangga.
- Kpu. 2013. *List Anggota Parlemen Provinsi di Pulau Sumatera*. Diunduh dari [kpu.go.id](http://kpu.go.id).
- Jhingan, M.L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Edisi Keenam belas*. Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada.